



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI JAWA BARAT  
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2013 – 2014**

**A. PENDAHULUAN**

a. Dasar Kunjungan Kerja

- i. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
- ii. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

b. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

c. Susunan Tim

**ANGGOTA KOMISI III DPR RI:**

1. **Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T.** Ketua Tim / Wkl. Ketua Komisi III/ F – PAN
2. **Dr. H. Aziz Syamsuddin, S.H.** Wkl. Ketua Komisi III / F – PG
3. H. Daday Hudaya, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PD
4. Didi Irawadi S, S.H., Anggota Tim/ F – PD
5. H. Zulkifli Anwar Anggota Tim/ F – PD
6. DR. H. Deding Ishak, S.H.,M.H. Anggota Tim/ F – PG
7. Bambang Soesatyo, S.E.,M.B.A. Anggota Tim/ F - PG
8. DRS. M. Nurdin, M.M. Anggota Tim/ F – PDIP

9.	Ichsan Sulistio	Anggota Tim/ F – PDIP
10.	Herman Hery	Anggota Tim/ F – PDIP
11.	Drs. H. Adang Daradjatun	Anggota Tim/ F – PKS
12.	DRS. H. A. Kurdi Moekri	Anggota Tim/ F – PKS
13.	H. Andi Anzhar Cakra Wijaya	Anggota Tim/ F – PAN
14.	H. Baharudin Nasori, S.S.,M.M.	Anggota Tim/ F – PKB
15.	Desmond J. Mahesa	Anggota Tim/ F – Gerindra
16.	H. Sunardi Ayub, S.H.	Anggota Tim/ F – Hanura

Dalam kunjungan kerja tersebut, Tim juga didampingi oleh Sekretariat Komisi III DPR RI, Tenaga Ahli Komisi III DPR RI; serta Penghubung dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung.

d. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2014.

e. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:

- i. Rapat Kerja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat;
- ii. Rapat Kerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat; Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara; Ketua Pengadilan Militer beserta jajarannya;
- iii. Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya;
- iv. Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

## **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **a. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI JAWA BARAT**

#### **i. Bidang Anggaran**

Dalam DIPA Tahun 2013 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 252.685.276.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang terealisasi sebesar Rp. 237.195.431.144,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar 93,87%.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang menjadi skala prioritas dan rencana strategis tersebut diantaranya adalah belum meratanya distribusi pegawai, penanganan terhadap pembayaran uang pengganti, belum optimalnya mekanisme pengawasan, dan terbatasnya anggaran tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2014 ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima pagu anggaran sebagaimana tertuang dalam dipa sebesar Rp. 242.730.702.000,00 (*Dua ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah*).

#### **ii. Bidang Pengawasan**

Perkara Tindak Pidana Umum yang menonjol di lingkungan kejaksaan tinggi jawa barat antara lain menyangkut tindak pidana narkoba (429 perkara), tindak pidana terkait perlindungan anak (582 perkara) serta tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ( 5 perkara ). Hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan khususnya terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum diantaranya yaitu: Masih sering adanya intervensi dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum, masih belum optimalnya dukungan anggaran, dan masih terjadinya pengiriman SPDP dari penyidik polri yang tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas tahap I ataupun berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) tetapi tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

Selanjutnya terkait dengan kebijakan ke depan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka agenda pembaharuan kejaksaan, maka kejaksaan tinggi sebagai perpanjangan tangan dari instansi Kejaksaan RI di daerah pada prinsipnya mendukung dan melaksanakan setiap kebijakan dan langkah yang telah ditetapkan oleh pimpinan kejaksaan terkait dengan agenda pembaharuan kejaksaan antara lain: Melaksanakan tugas pokok

dan fungsi kejaksaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen, menyusun dan memperbaiki sistem manajemen kepegawaian, meningkatkan disiplin kerja dan efektifitas kerja, dan meningkatkan pelayanan publik.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam diskusi antara Anggota Tim Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat yakni optimalisasi penanganan berbagai kasus korupsi yang ada di wilayah Jawa Barat, Pelaksanaan tugas dalam tujuan penyelamatan kerugian negara dan pengembalian uang negara, Perhatian pada tingginya jumlah perkara yang melibatkan Anak, Permasalahan penyerapan Anggaran dan kebutuhan Anggaran, serta Peningkatan profesionalitas Jaksa dengan sistem *Reward and Punishment*.

**b. KETUA PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAWA BARAT**

**i. Bidang Anggaran**

Pagu Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Satuan Kerja di bawahnya sebesar Rp. 204.425.892.000,- (Dua Ratus Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran Tahun 2013 untuk Anggaran yang bersumber dari DIPA Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung sebesar Rp. 197.647.786.490,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 96,68 % dari total Pagu. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2013 untuk Anggaran yang bersumber dari DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sebesar Rp. 3.515.990.855,- (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 96,11 % dari total PAGU sebesar Rp. 3.658.414.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Program yang menjadi skala prioritas dalam tahun anggaran 2013 adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, selain itu juga program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan umum serta Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Pagu DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 195.763.287.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sementara untuk DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.056.594.000,- (Empat Milyar Lima

Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk program peningkatan manajemen peradilan umum.

**ii. Bidang Pengawasan**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan langkah- langkah dan kebijakan penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui: Pembinaan, pelatihan dan pendidikan. Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah melakukan langkah-langkah menuju pencapaian reformasi birokrasi peradilan dengan cara meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan peningkatan sistem kerja melalui kegiatan pencapaian target jangka pendek seperti transparansi informasi, audit kinerja pegawai, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur, mengadakan Pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan Teknis dan administrasi bagi aparat peradilan.

Dalam tahun 2013 (Periode 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013) Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menyelesaikan perkara banding perdata berjumlah 560 perkara dari jumlah 625 perkara atau berjumlah 89,6% sehingga adanya kenaikan dalam penyelesaian perkara banding yang pada tahun 2012 sebesar 84,4%, perkara banding pidana telah diputus 446 perkara dari jumlah 498 perkara atau berjumlah 89,6% sehingga adanya penurunan dalam penyelesaian perkara banding yang pada tahun 2012 sebesar 96,2% dan dalam perkara tipikor telah diputus 47 perkara dari jumlah 52 perkara atau sekitar 90,4%

**c. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

**i. Bidang Anggaran**

PTA Jawa Barat memiliki dua DIPA yakni DIPA Badan Urusan Administrasi MA-RI (DIPA-01) dan DIPA Badan Peradilan Agama MA RI (DIPA-04) dengan jumlah keseluruhan Rp. 185.212.534.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 185.482.219.547,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 100,15. Program Peningkatan penerimaan PTA Jawa Barat berfokus pada peningkatan Sistem Keterbukaan Informasi yang lebih berfokus pada pelayanan publik, yakni dengan lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai syarat, prosedur, dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama. Pagu Definitif Pengadilan Agama se Jawa Barat dan PTA Jawa Barat sebesar Rp. 182.042.261.000 (Seratus Delapan

Puluh Dua Miliar Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah.

**ii. Bidang Pengawasan**

Dalam jawaban tertulisnya, PTA Jawa Barat telah melakukan realisasi fungsi pengawasan di bidang Hukum Acara dan Formal Peradilan Agama. PTA Jawa Barat juga telah melakukan pengawasan rutin dengan melaksanakan eksaminasi berkas perkara di tiap-tiap Pengadilan Agama se Jawa Barat melalui Hakim Pengawas Daerah yang ditunjuk.

Pelaksanaan transparansi proses Peradilan Agama mengacu pada KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 (28 Agustus 2007), khususnya dibidang keperkaraan atau proses penanganan perkara yakni tentang Jalannya Proses Penanganan Perkara dan tentang Keuangan Perkara. Pada tahun 2013, PTA Jawa Barat telah menangani perkara sebanyak 223 perkara (88,1%) dari 253 perkara. Dalam upaya memaksimalkan pelayanan serta transparansi di lingkungan Peradilan Agama di wilayah Jawa Barat selain dilakukan pengawasan internal peradilan, juga dilakukan pengawasan eksternal yakni oleh BPK, LSM, dan Masyarakat secara umum. Dalam memfasilitasi hal tersebut, telah dibuka kotak pengaduan dan disarankan untuk menyampaikannya menggunakan formulir khusus melalui meja pengaduan, atau website PTA.

**d. KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

**i. Bidang Anggaran**

Pada awal tahun 2013, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera adalah sebesar Rp. 5.747.134.000,- (Lima milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga anggaran DIPA tahun 2013 menjadi Rp. 10.173.277.000,- (Sepuluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

**ii. Bidang Pengawasan**

Kebijakan dan langkah-langkah penguatan kelembagaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal dengan komposisi pegawai, jabatan dan kepangkatan demi tercapainya Peradilan yang agung sebagaimana yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dengan melakukan perubahan-perubahan, khususnya perubahan mengenai Pola berfikir (Mind Set) dan Pola bertindak (Culture set).

Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Bandung langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain dengan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Kinerja, dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Pencari Keadilan (Justiabelen)

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas, integritas, dan profesionalisme oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan memberikan bimbingan serta mensosialisasikan program kerja kepada seluruh Pegawai dan bila akan dilakukan rapat atau pertemuan maka sudah dibuat dalam pengumuman rapat-rapat melalui web site PTUN Bandung.

Sengketa yang menonjol di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah Pertanahan dan Sengketa Perburuhan. Pada Tahun 2013, Pengadilan TUN Bandung berhasil memutus 117 Perkara dari 182 Perkara dengan Dismissal sebanyak 25 Perkara.

**e. KEPALA PENGADILAN MILITER**

**i. Bidang Anggaran**

Untuk anggaran keuangan serta realisasi dalam Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah DIPA (663271.01) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I sebesar 3.675.833.000,- dan DIPA (663272.05) dari Ditjen Badilmiltun sebesar Rp. 75.000.000,-. Sedangkan di tahun 2014, DIPA (663271.01) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I sebesar 3.546.366.000,- dan DIPA (663272.05) dari Ditjen Badilmiltun sebesar Rp. 85.000.000,-.

**ii. Bidang Pengawasan**

Telah dilakukan capacity Building dengan berbagai program dan Reformasi Birokrasi berdasarkan program *Quick Wins* Mahkamah Agung. Langkah-langkah untuk mewujudkan peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim Militer juga telah ada.

Sedangkan mengenai data perkara yang ditangani, Perkara yang cukup menonjol dan banyak diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Perkara Desersi, Perkara Pembunuhan Berencana dan Perkara Narkotika. Telah menyelesaikan 286 perkara dari 310 perkara dan samapi saat ini menyisakan 22 perkara.

Berikut merupakan hal-hal yang didiskusikan dengan Pimpinan Wilayah Peradilan yakni sebagai berikut: Mengenai masukan, saran, dan kritik untuk RUU tentang Mahkamah Agung dan Contempt of Court, Masih terjadi

perdebatan antara kewenangan pusat dan daerah mengenai putusan PTUN terhadap Permasalahan GKI Yasmin, Perlunya peningkatan pengamanan dalam persidangan dan pengaturan yang jelas, Mengenai ketentuan penanganan perkara PEMILU yang diatur terlalu cepat atau tidak implementatif, Keluhan tentang tunjangan kehormatan dan Gaji Pokok yang hilang yang berdampak buruk bagi kesejahteraan hakim yang pensiun dan dalam pembahasan RUU Advokat masih terjadi perselisihan antara PERADI dan KAI.

**f. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI JAWA BARAT**

**i. Bidang Anggaran**

Dari DIPA 2013 sebesar Rp. 418.105.948.000,00, dapat direalisasi sebesar Rp. 379.742.769.000,00 atau sebesar 90,82%. Kendala dalam realisasi DIPA Tahun 2013 adalah masih kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran serta terdapat beberapa UPT yang memiliki keterbatasan SDM pengelola anggaran/keuangan. Sedangkan Pagu Anggaran untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 591.506.168.000,00. Adapun program yang menjadi skala prioritas tahun anggaran 2014 adalah Program Pembangunan Lanjutan UPT, yaitu: Pembangunan Lanjutan Lapas Anak Bandung; Pembangunan Lanjutan Lapas Gunung Sindur Bogor; Pembangunan Lanjutan Rutan Gunung Sindur Bogor; Pembangunan Lanjutan Lapas Klas III Bekasi; Pembangunan Lanjutan Rutan Depok; Pembangunan Lanjutan Lapas Warung Kiara Sukabumi; dan Pembangunan Lanjutan Rutan Bandung.

**ii. Bidang Pengawasan**

Kondisi aktual Lapas dan Rutan serta BAPAS dan RUPBASAN di Jawa Barat sebagai berikut: Lapas dan Rutan ☐ Jumlah Penghuni sebanyak 16.953 orang yang terdiri dari: (Tahanan sebanyak 4.218 orang dan Narapidana sebanyak 12.735 orang) Jumlah Penghuni tindak pidana khusus sebanyak 7.159 orang, dan Jumlah Penghuni tindak pidana umum sebanyak 9.794 orang. Jumlah Klien BAPAS sebanyak 8.003 orang yang terdiri dari: Klien Anak 290 orang. Klien Dewasa 7.713 orang. Sedangkan Jumlah Basan dan Baran sebanyak 478 perkara.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah melakukan antisipasi pengamanan dan sosialisasi PEMILU 2014 di Lapas Rutan bekerja sama dengan KPUD, Pemda setempat maupun dengan pihak POLRI dan telah direncanakan strategi pengamanan pada saat persiapan dan



pelaksanaan Pemilu sesuai dengan standar pengamanan Lapas dan Rutan. Mengenai Pengawasan Orang Asing, penindakan yang dilakukan terdiri dari tindakan administratif dan Pro Justisia. Adapun data orang yang dideportasi sejumlah 61 orang dan pro justisia sebanyak 2 orang. Di wilayah Jawa Barat sering ditemukan imigran ilegal yang terdampar. Data Imigran Ilegal pada tahun 2013 paling banyak berada di Kanim Bogor dan tersebar di Kanim Bandung, Depok, Karawang, Sukabumi, dan Tasikmalaya.

Mengenai Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian (undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 ayat 10).

Mengingat kebutuhan masyarakat dalam hal pembuatan paspor sederhana mungkin sehingga diperlukan perubahan alur permohonan paspor yang di sebut dengan One Stop Service (OSS) yang sampai sekarang masih diujicobakan di sembilan Kantor Imigrasi, salah satunya di Kantor Imigrasi Bandung yang akan di aplikasikan ke seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia; Mengingat pelayanan paspor dengan One Stop Service (OSS) sangat memudahkan masyarakat, karena dengan sekali datang saja masyarakat dapat memperoleh paspor dan pembayarannya dilakukan melalui Bank BNI;

**g. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**i. Bidang Anggaran**

Alokasi DIPA Polda Jabar 2013 didukung sebesar Rp. 2.411.119.247.000,- (*Dua triliun empat ratus sebelas milyar seratus Sembilan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2.362.145.402.500,- (*Dua triliun tiga ratus enam puluh dua milya seratus empat puluh lima juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah*) sehingga anggaran DIPA Tahun 2013 terserap sebesar 97,97% atau selisih 2,03% dari target 100% yang ditetapkan. Selisih 2,03 % dikarenakan adanya kelebihan prediksi usulan belanja pegawai dari rencana alokasi penambahan personel dari Mabes Polri tidak memenuhi target.

Program yang menjadi skala prioritas meliputi: Pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, Kerjasama Keamanan dan Ketertiban, Pemberdayaan potensi keamanan, Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat, Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan Penanggulangan gangguan kamdagri berkadar tinggi. Sedangkan Pagu Definitif Anggaran Polda Jabar pada tahun 2014 adalah Rp. 2.077.127.435.000.

**ii. Bidang Pengawasan**

Jumlah potensi konflik di Wilayah Hukum Polda Jabar berdasarkan laporan Asisten Operasi Kapolri bulan Oktober tahun 2013, bahwa Wilayah Hukum Polda Jabar menempati urutan kelima se-Indonesia dengan jumlah potensi konflik sebanyak: 151 potensi konflik, terdiri dari: masalah Poleksosbud 82 potensi konflik, SARA 45 potensi konflik, batas wilayah 5 potensi konflik dan sumder daya alam 19 potensi konflik. Upaya yang telah dilakukan Polda Jabar dalam pencegahan konflik horizontal tersebut adalah: Melaksanakan patroli dialogis, Meningkatkan deteksi dini dan deteksi aksi, Meningkatkan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan Ipoleksosbudkam, dicari sumber permasalahannya, Melaksanakan penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tahanan politik, dan Melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku dan koordinasi GAKKUMDU melaksanakan pembinaan dengan cara sambang desa. Penjelasan lengkap juga mengenai Kesiapan Polda dalam Pengamanan PEMILU 2014 yang dijelaskan secara terpisah.

Sedangkan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, Polda Jabar selama tahun 2013 telah melaksanakan penyidikan sebanyak 112 perkara dan dapat ditindaklanjuti sebanyak 77 perkara. Polda Jabar dalam Upaya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat Umum, Instansi Pemerintah, Sekolah, Ormas, LSM dll dalam upaya Preemptif dan Preventif. Data Kasus Narkoba berjumlah 1586 kasus yang melibatkan anggota Polri sebanyak 17 orang. Terdapat pula data human trafficking dan people smuggling yang ditangani yakni sebanyak 7 kasus trafficking dan 24 people smuggling. Selain itu juga menangani 3 kasus cyber crime. Jenis kejahatan tertinggi di wilayah hukum Polda Jabar adalah Curanmor, Curat dan Curas.

Terdapat hal-hal yang berkembang dalam pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat yang pada pokoknya adalah: Permasalahan minimnya anggaran, terutama dalam penanganan PEMILU dan anggaran intelijen, masih dirasakan, Penanganan Geng Motor diperlukan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dialog dan pemberdayaan masyarakat yang

sudah dilakukan Polda dinilai baik dan perlu ditingkatkan, Mengenai permasalahan lingkungan dan pertambangan perlu koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait, Apresiasi terhadap model Evaluasi dari Kasat Lantas Cimahi yang patut dicontoh oleh pimpinan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi diri, Perlunya pendalaman dan penggunaan program “zero kompromi”, Diperlukannya peningkatan pada penanganan sektor korupsi di beberapa kasus dan permasalahan di Jawa Barat oleh Polda, Sepakat untuk kebutuhan revisi RUU KUHP dan KUHP, Pendalaman Model dan Indeks kebutuhan BABINKAMTIBNAS yang dilakukan oleh Polda Jabar dan Perlunya perhatian pada permasalahan penyelundupan manusia dan TKI pada jaringan dan organisasinya.

#### **h. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT**

##### **i. Bidang Anggaran**

Pagu Anggaran BNNP Jabar sebesar Rp. 7.523.009.000,- (Tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ribu rupiah). Penambahan anggaran 5 (lima) BNNK baru bulan Oktober 2013 untuk pengadaan Peralatan kantor dan Kendaraan operasional. Dengan prioritas program yakni untuk Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan, Instansi pemerintah dan Swasta; dan Melaksanakan Penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahguna narkoba dengan penindakan dan pengejaran untuk memutus jaringan peredaran gelap narkoba. Sedangkan Anggaran kegiatan BNNP Jawa Barat tertuang dalam DIPA BNNP Jawa Barat nomor 066-01.2.682469/2014 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp 6,025,350,000.

##### **ii. Bidang Pengawasan**

BNNP Jawa Barat menyusun rencana strategis yakni Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dari Luar maupun Dalam Negeri, dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Sedangkan kendala yang masih dihadapi yakni belum terpenuhinya SDM, kondisi kantor yang kurang memadai, perlunya tambahan jumlah personil

Polri guna penyelidikan dan penyidikan, alat DF yang tidak ada dan sarana operasional kendaraan yang terbatas.

Mengenai penanganan perkara, jumlah penanganan perkara di tahun sebanyak 9 LKN dan tersangka 19 orang, sedangkan di tahun 2014 sudah mencapai 3 LKN dan 4 orang tersangka. Dalam melaksanakan tugasnya BNNP Jabar juga melakukan koordinasi yakni dengan BNN Pusat dan BNNP terdekat, seperti Banten dan Jawa Tengah

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan III Tahun 2013-2014 ke Provinsi Jawa Barat ini; yakni dalam pertemuan dengan Kajati Jawa Barat, Pimpinan Wilayah Peradilan di Provinsi Jawa Barat, Kakanwil Provinsi Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan BNP Jawa Barat maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- a. Perlunya perhatian dari Pemerintah atau instansi-instansi terkait mengenai anggaran untuk penanganan tindak pidana korupsi serta realisasinya untuk menjadi tolok ukur kinerja. Hal ini ditujukan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas program pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Barat.
- b. Baik dari sisi Dukungan Anggaran maupun Legislasi atau pengaturan yang jelas dari pihak-pihak terkait dalam mendukung suksesnya penanganan perkara dan pengamanan PEMILU 2014 (Pileg dan Pilpres).
- c. Perhatian pada Sistem Reformasi Birokrasi pada aparat penegak hukum maupun badan peradilan yang dapat dilakukan dengan Sistem Reward and Punishment.
- d. Permasalahan overkapasitas yang dapat diminimalisir dengan perubahan pola penindakan terhadap terpidana Narkoba yang tergolong pengguna dengan optimalisasi program rehabilitasi.
- e. Perlunya dukungan terhadap pembangunan LAPAS Khusus Anak di Jawa Barat oleh pihak-pihak terkait.
- f. Perhatian pada meningkatnya trend masuknya imigran gelap lewat jalur transportasi di Jawa Barat. Permasalahan terkait seperti penanganan penyaluran TKI dan penyelundupan manusia juga mulai tampak.
- g. Model program self-evaluasi pada tiap periode terhadap kinerja yang telah dilakukan dapat menjadi role model atau pola baru dalam evaluasi dan inovasi ke depan, terutama bagi pimpinan dan aparat penegak hukum.

- h. Sistem Komunikasi yang dibangun dengan masyarakat akan membantu dalam meredam terjadinya konflik horizontal terutama dalam masa-masa tahun PEMILU.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik

KOMISI III DPR RI,

IR. TJATUR SAPTO EDY, M.T.